

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik di semenanjung Korea sudah di mulai dari tanggal 25 Juni tahun 1950. Konflik ini terjadi akibat perbedaan ideologi di antara keduanya. Korea Utara memiliki ideologi sosialis komunis yang disertai dengan ideologi *Juche* yakni ideologi yang mengajarkan sikap berdiri sendiri serta menutup diri dari dunia luar.¹ Sedangkan Korea Selatan berideologi Liberal Demokratis. Korea Utara sudah sejak awal tetap memegang kebijakan apa yang dinamakan "One Policy". Korea Utara mempunyai kebijakan untuk meng-komuniskan seluruh kawasan semenanjung Korea selama 3 generasi, baik generasi Presiden Kim Il-sung, Kim Jong-il dan Kim Jong-un.² Konflik ini semakin berlanjut ketika Korea Utara mulai mengembangkan program nuklirnya. Pengembangan nuklir di kawasan Asia ini membuat resah masyarakat Internasional. Korea Selatan dan sekutunya Amerika Serikat khawatir dengan adanya Nuklir di Korea Utara akan mengganggu kestabilan keamanan di Asia Timur.

¹ Iwan Sulisty, *Krisis Semenanjung Korea dan Jalan Berliku Reunifikasi*, (diakses pada 23 September 2014); dapat diakses di <http://www.harianhaluan.com>.

Korea Utara membangun reaktor nuklir pertama kali di tahun 1965. Reaktor model Uni Soviet dibangun untuk tujuan Penelitian di kawasan Yongbyeon, Korea Utara.³ Namun, Korea Utara semakin mengembangkan kegiatan nuklirnya hingga sekarang. Dibandingkan dengan Korea Selatan yang mengalami peningkatan ekonomi sejak tahun 1980-an, Korea Utara mengalami banyak kesulitan diantaranya bencana alam, kemiskinan, dan kelaparan di musim dingin.⁴ Walaupun kesejahteraan rakyat Korea Utara tidak tercapai, Korea Utara memprioritaskan kebijakan meningkatkan kemampuan militer dan mengembangkan nuklir sebagai *bargaining position* dengan negara luar seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, China, Jepang dan lainnya untuk melakukan hubungan diplomatik dengan syarat meminta bantuan ekonomi.⁵

Pemerintah Korea Selatan selalu mengajak Korea Utara untuk berdialog baik masalah tentang unifikasi, kerjasama dan permasalahan krisis nuklir Korea Utara. Dimulai pada pemerintahan Presiden Jeon Do Hwan (1980-1988) dengan formula unifikasi untuk harmoni dan demokrasi pada tahun 1982. Dilanjutkan pemerintahan Roe Tae Woo (1988-1993) yang mengusulkan mengenai rencana Unifikasi untuk satu komunitas nasional di tahun 1989. Lalu, Pemerintahan Kim Young Sam (1993-1998) yang membahas mengenai formula unifikasi untuk komunitas nasional Korea di tahun

³ KBS World Radio, *Kronologi Program Nuklir Korut*, (diakses pada 24 September 2014); dapat diakses di http://world.kbs.co.kr/indonesian.event.nkorea_nuclear_m

⁴ Iwan Sulisty, *Op.Cit.*,

⁵

1994. Selanjutnya, Pemerintahan Kim Daejung, Roh Moo Hyun dan Lee Myung Bak melanjutkan dengan formula unifikasi komunitas nasional Korea. Prinsip dari formula unifikasi komunitas Korea yaitu prinsip yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan demokrasi yang berfungsi untuk mempromosikan pertukaran dan kerjasama antar Korea.⁶

Pemerintahan Kim Dae Jung (1998-2003) dan Roh Moo Hyun (2003-2008) melakukan pendekatan soft power dengan pemberian bantuan kemanusiaan dan kerjasama ekonomi. Kebijakan yang ditetapkan oleh Kim Dae Jung ini disebut *Sunshine Policy*. Kebijakan Sinar Matahari ini bermaksud untuk mengajak Korea Utara masuk kedalam arena masyarakat Internasional.⁷ Kebijakan sinar matahari ini lebih mengedepankan kerjasama dan pertukaran perdagangan.⁸ Dengan kebijakan ini, Pertemuan puncak yang pertama setelah semenanjung Korea terbagi menjadi dua berhasil diselenggarakan. Pertemuan ini diselenggarakan pada tanggal 14-16 Juni 2000 di Pyongyang. Dari pertemuan ini diperoleh deklarasi yang berisi 5 pasal yang membahas mengenai penuntasan masalah reunifikasi Korea. Masa pemerintahan Kim Dae Jung, merupakan awal dari kerjasama ekonomi di daerah Gaeseong, Korea Utara. Selain mengenai kerjasama, dari pertemuan ini disepakati adanya pertemuan

⁶ Ministry of Unification Republic of Korea, *Korean National Community Unification Formula*, (diakses pada 24 September 2014); dapat diakses di <http://eng.unikkorea.go.kr>

⁷ Yang, Seung Yoon dan Mochtar Mas' oed, *Op. Cit.*, hal: 244

⁸ Tempo News, *Menuai kritik, Lee Myung Bak tetap melaju*, September, 2011(diakses pada 24 September 2014); dapat diakses di <http://m.tempo.co/read/news>

rombongan reuni keluarga antar Korea serta menuntaskan masalah tahanan pro Korea Utara yang berlandaskan perikemanusiaan.⁹

Di masa pemerintahan Lee Myung Bak (2008-2013), Kebijakan Lee Myung Bak berfokus pada peningkatan ekonomi dalam negeri dan kerjasama aliansi dengan Amerika Serikat. Lee Myung Bak merasa kecewa dengan Korea Utara, karena setelah bantuan dari kebijakan sinar matahari yang diberikan oleh Korea Selatan, Korea Utara tetap tidak beralih dari kebijakannya untuk mengembangkan senjata nuklir. Lee Myung Bak pun ingin lebih memperhatikan keamanan Korea Selatan. Lee Myung Bak lebih giat melakukan kerjasama militer dengan Amerika Serikat dengan tujuan untuk menjaga wilayah Korea Selatan dari ancaman pihak luar. Dalam bidang ekonomi, di bawah kepemimpinan mantan CEO Hyundai ini, Korea Selatan berhasil menjadi ketua G-8 dan tuan rumah dari G-20. Kerjasama militer dengan Amerika Serikat dan kesuksesan Korea Selatan dalam hal ekonomi membuat Korea Utara melakukan provokasi kembali dengan menghancurkan *Cheonan*, sebuah kapal angkatan laut milik Korea Selatan di bulan maret 2010. Korea Utara juga menyerang pulau Yeonpyeong dengan cara menembaki dan membunuh tentara dan masyarakat Korea Selatan di pulau Yeonpyeong pada bulan November 2010.¹⁰

⁹ Yang, Seung Yoon dan Mochtar Mas'ood, *Op.Cit*, hal. 235

¹⁰ Park Geun Hye, *A new kind of Korea*, (diakses pada 25 September 2014); September/October 2011, dapat diakses dari: <http://foreignaffairs/articles/68136/park-geun-hye>

Ternyata, berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh presiden Korea Selatan sejak berakhirnya perang sampai masa pemerintahan Lee Myung Bak belum mampu mengubah pikiran Korea Utara untuk menghentikan pengembangan senjata nuklirnya. Kebijakan luar negeri serta pendekatan yang dilakukan oleh Korea Selatan tidak berhasil mengubah sikap dari Korea Utara. Provokasi selalu dilakukan Korea Utara terhadap Korea Selatan jika ada perubahan kebijakan di pemerintahan Korea Selatan yang tidak disukai oleh Korea Utara. Tidak hanya Korea Selatan yang berperan dalam pelucutan nuklir dan mengatasi krisis di Semenanjung Korea. Amerika Serikat, China dan Organisasi Internasional pun telah melakukan banyak perundingan dan pemberian bantuan ke Korea Utara. Contohnya saja, *six party talks* yang telah gagal menghentikan perkembangan nuklir Korea Utara. Korea Utara mengundurkan diri dari perundingan ini di bulan April 2009. Korea Utara mengundurkan diri dari perundingan segi-6 karena PBB memberikan sanksi terhadap Korea Utara atas percobaan uji nuklirnya di tahun 2009.

Pada tanggal 25 februari 2013, telah dilantik Presiden wanita pertama di Korea Selatan yang bernama Park Geun Hye. Park Geun Hye merupakan presiden ke-11 Korea Selatan. Beliau merupakan anak dari presiden Korea Selatan ke-3, Park Chung Hee. Presiden Park Geun Hye mewakili partai Saenuri dalam pemilihan

presiden Korea Selatan di tahun 2012. Selain menjadi ketua dari partai Saenuri, beliau juga merupakan anggota dari majelis nasional Korea.¹¹

Di awal pemerintahan Park Geun Hye, Park sudah menghadapi berbagai ancaman dari Korea Utara. Contohnya saja, provokasi Korea Utara terhadap Korea Selatan, Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya yang ke-3 di bulan februari 2013.¹² dan lainnya. Sebagai presiden Korea Selatan, Park juga ingin mengajak Korea Utara untuk menghentikan pengembangan nuklir Korea Utara dan provokasi yang dilakukan Korea Utara terhadap Korea Selatan selama ini. Nuklir Korea Utara dan provokasi dari Utara selalu mengancam keamanan dan ketahanan wilayah Korea Selatan maupun negara tetangga lainnya. Karena hal itu, krisis semenanjung Korea bukan hanya menjadi permasalahan antar Korea namun permasalahan internasional. Park Geun Hye pun harus mengeluarkan strategi kebijakan luar negeri dengan fokus Korea Utara untuk mengatasi krisis semenanjung Korea.

¹¹ Wikipedia, *Park Geun-hye* , (diakses pada 24 Juli 2014); dapat diakses dari http://en.wikipedia.org/wiki/Park_Geun-hye.

¹² Sarah Teo, *South Korea's Foreign Policy in 2013: Building Trust in East Asia*, (diakses pada tanggal 24 Juli 2014); Februari, 2014 dapat diakses dari: <http://e-ir.info>

B. Tujuan Penulisan

Tujuan Penelitian dari penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk membuktikan jawaban dari rumusan masalah dan membuktikan hipotesa dengan teori, data, serta fakta yang relevan.
2. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara dalam mengatasi krisis semenanjung Korea
3. Menjelaskan dan memberikan informasi mengenai strategi kebijakan luar negeri Presiden Park Geun Hye di Semenanjung Korea.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dijabarkan diatas, rumusan masalah yang muncul yaitu:
“bagaimana strategi kebijakan luar negeri pemerintahan Park Geun Hye terhadap Korea Utara dalam mengatasi krisis semenanjung Korea?”

D. Kerangka Dasar Pemikiran

Dalam membantu penulis untuk menentukan arah penelitian serta

Diplomasi

Menurut KM Panikkar dalam bukunya *The Principle and Practice of Diplomacy* menyatakan bahwa diplomasi adalah seni mengedepankan kepentingan nasional suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain.¹³ Ivo D. Duchacek mempunyai pendapat bahwa "Diplomasi biasanya didefinisikan sebagai praktek pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dengan cara negosiasi dengan negara lain".¹⁴ Dari definisi diatas tampak jelas bahwa unsur pokok diplomasi adalah negosiasi. Dan negosiasi dilakukan untuk mengedepankan kepentingan negara.

Diplomasi dengan berbagai instrumen nya sangat penting bagi negara-negara untuk melakukan hubungan antar negara. Sebuah negara menggunakan diplomasi sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda - beda. Media diplomasi dapat digunakan untuk meredakan konflik yang terjadi antara negara - negara yang berselisih, yakni dengan menggunakan sarana *lobbying* dan *bargaining*. Korea Selatan termasuk salah satu negara yang selalu menggunakan diplomasi untuk menjalin hubungan dengan negara tetangganya, Korea Utara. Berbagai macam pendekatan telah dilakukan oleh Korea Selatan terhadap Korea Utara untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Korea Selatan mempunyai beberapa kepentingan nasional yakni menjaga keamanan wilayah dan warga Korea, peningkatan ekonomi, reunifikasi dengan Korea Utara secara damai dan lainnya. Untuk mencapai kepentingan nasionalnya, Korea Selatan di masa pemerintahan Park Geun Hye mencoba untuk memainkan diplomasi lebih *flexible* lagi dari masa pemerintahan presiden sebelumnya. Pemerintahan Park mengajak Korea Utara untuk ber negosiasi, dialog, kerjasama, pertukaran dengan ada saling percaya satu sama lainnya. Kedua negara berselisih sejak perang Korea hingga sekarang sehingga membuat kedua Korea sulit untuk mempercayai satu sama lainnya. Selain itu, Insiden tenggelam nya kapal perang Korea Selatan Cheonan dan penyerangan pulau Yeonpyeong di tahun 2010 membuktikan bahwa tidak adanya saling percaya antara kedua Korea.¹⁵ Ketidakpercayaan satu sama lainnya juga menyebabkan diplomasi dari presiden-presiden Korea Selatan terhadap Korea Utara sebelumnya tidak berhasil dilakukan. Oleh karena itu, untuk membuat diplomasi yang lebih fleksible, Pemerintahan Park Geun Hye membangun kepercayaan di semenanjung Korea. Pemerintahan Park Geun Hye mengeluarkan kebijakan luar negeri *trust-building process* dalam menjalankan seni diplomasi nya.¹⁶ Dengan adanya diplomasi dengan Kebijakan membangun kepercayaan ini, Korea Selatan berupaya untuk merubah kebijakan, tindakan, tujuan, dan sikap pemerintahan Korea Utara ke arah yang lebih baik.

¹⁵ Park Geun Hye, *Op.Cit.*,

¹⁶ Ministry of Unification Korea, *Policy Concept and Background*, diakses pada 7 September 2014, dapat diakses di <http://eng.unikorea.go.kr/content.do?cmsid=1781>

Di masa pemerintahan Park Geun Hye, Korea Selatan melakukan diplomasi dengan Korea Utara dengan mengadakan pertemuan keluarga yang terpisah, kerjasama ekonomi Gaeseong, kemanusiaan dan lainnya. Selain berdiplomasi dengan Korea Utara, Korea Selatan akan meningkatkan diplomasi dengan negara lain demi meningkatkan dukungan terhadap penyelesaian krisis semenanjung Korea secara damai.

Selama melakukan diplomasi dengan Korea Utara dengan cara damai, Korea Selatan harus menyiapkan *power* berdiri di belakang. Korea Selatan membutuhkan kekuatan militer pendukung untuk menghadapi provokasi Korea Utara kedepannya. Hal ini diwujudkan dengan adanya aliansi militer.

Strategi Aliansi Militer

Menurut K.J Holsti dalam bukunya *International Politic: A framework for analysis* mengatakan bahwa pemerintah yang berusaha membangun koalisi diplomatik atau aliansi militer yang permanen mengasumsikan bahwa mereka tidak dapat mencapai tujuan mereka, mempertahankan kepentingan mereka, atau menghalangi ancaman yang dirasakan dengan memobilisasikan kemampuan mereka sendiri. Jadi, mereka mengandalkan dan membuat komitmen dengan negara lain yang juga

menghadapi masalah luar negeri yang sama, atau secara bersama mereka mencapai tujuan itu.¹⁷

Peningkatan pertahanan dan keamanan dengan strategi aliansi militer merupakan keberlanjutan dari diplomasi yang telah dilakukan dengan cara negosiasi. Di masa pemerintahan Park Geun Hye, Korea Selatan akan meningkatkan aliansi dengan sekutunya Amerika Serikat. Aliansi diantara keduanya sudah terjalin sejak lama.¹⁸ Dimulai dari Perang Korea tahun 1950 Amerika Serikat membantu militer Korea Selatan atas usaha Korea Utara mengambil alih Korea Selatan. Banyak tentara Amerika Serikat yang terlibat dalam konflik Semenanjung Korea hingga pada akhirnya kedua negara memiliki perjanjian pertahanan pada tahun 1953.

Kawasan semenanjung Korea sebenarnya masih dihadapkan pada kondisi perang karena baik Korea Selatan maupun Korea Utara hanya memiliki kesepakatan gencatan senjata dan belum memiliki kesepakatan damai. Melihat hal itu, Korea Selatan perlu memiliki pihak yang dapat melindungi negaranya apabila Korea Utara melakukan provokasi ataupun menyerang wilayah Korea Selatan. Kekuatan militer Korea Selatan dan Korea Utara memang terlalu jauh. Menurut *global fire power*, kekuatan militer Korea Selatan berada di peringkat 9 dunia, sedangkan Korea Utara

¹⁷ K.J Holsti, *International Politic: A framework for analysis*, Third Edition, (New Delhi: practice, 1984), hal. 183

¹⁸ Asia Pasific Defense Forum, Presiden Korea Selatan Park Geun-hye menuai pujian tinggi setelah 100 hari, 14 Juni 2013, (diakses pada 9 Oktober 2014); dapat diakses pada

berada dalam peringkat 35 dunia.¹⁹ Tetapi kekuatan militer dan kepemilikan nuklir Korea Utara tetap di khawatirkan Korea Selatan. Ini terjadi akibat posisi Korea Utara dan Korea Selatan yang sangat berdekatan secara geografis.²⁰ Korea Selatan dan Korea Utara sama-sama berada di semenanjung yang sama. Jadi, sekecil apapun kekuatan militer dan kekuatan nuklir Korea Utara akan merugikan Korea Selatan dan mengancam keamanan wilayah dan masyarakat Korea. Di masa pemerintahan Presiden Park, Korea Selatan akan tetap meningkatkan aliansinya dengan Amerika Serikat dan negara sekutu lainnya. Hal tersebut di tunjukan dengan perjanjian kerjasama baru untuk meningkatkan militer bersama dalam menghadapi ancaman dari Korea Utara di masa mendatang. Penandatanganan kerjasama ini dilakukan pada tanggal 22 maret 2013.²¹ Peningkatan kerjasama ini dibuktikan dengan adanya berbagai latihan bersama antara militer Korea Selatan dan Amerika Serikat. Pemerintahan Park Geun Hye berkomitmen untuk mengembangkan sistem kill chain (sistem pertahanan rudal gaya Korea) dan Korean Air dan Missile Defense (KAMD) secepat mungkin. Sistem kill chain dirancang untuk mendeteksi misil yang datang atau serangan nuklir yang datang dan melancarkan serangan pencegahan. Selama pengembangan itu, Hak kendali

¹⁹ Global Fire Power, *Country Military Strength Detail*, (di akses pada 20 Desember 2014); dapat di akses dari <http://globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?>

²⁰ Peta Semenanjung Korea dapat dilihat pada lampiran di halaman 94

²¹ KBS World Radio, *Isi perjanjian kerjasama militer baru antara Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk menghadapi serangan Korea Utara dan efek perjanjian itu*, (diakses pada 9 oktober 2014); dapat di akses dari <http://world.kbs.co.kr/indonesian>

operasi masa perang yang merupakan hak mengendalikan operasi militer akan dipegang oleh sekutunya Amerika Serikat.

E. Hipotesa

Dari rumusan masalah yang dikemukakan diatas serta dengan menggunakan kerangka pemikiran teoritis yang dipakai, maka penulis dapat mengambil hipotesa bahwa Strategi kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara di masa pemerintahan Park Geun Hye yakni:

Melakukan penyeimbangan yang mudah disesuaikan dalam melakukan:

- Diplomasi dengan adanya kebijakan *trust-building process* terhadap Korea Utara
- Peningkatan Aliansi militer dengan Amerika Serikat.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi penulisan skripsi ini, penulis melakukan pembahasan mengenai kebijakan yang diinstruksikan oleh Presiden Korea Selatan ke-11, Park Geun Hye terhadap krisis Semenanjung Korea. Tapi tidak menutup kemungkinan penulis

dan membahas mengenai kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara di

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data *Library Research* (Penelitian kepustakaan) yaitu penelitian dengan cara membaca literatur dari berbagai media baik melalui buku, surat kabar, jurnal, artikel, internet maupun dokumen pemerintah. Penulis menggunakan konsep diplomasi dan aliansi militer dalam penulisan skripsi ini.

H. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang didalamnya diuraikan mengenai: latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II. Politik Luar Negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara

Bab ini menjelaskan mengenai hubungan antara Korea Utara dan Selatan, dan kebijakan - kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara yang pernah ada untuk mengatasi krisis semenanjung Korea. Baik Kebijakan yang pernah dilakukan setelah perang Korea, Kim Dae Jung, Roh Moo Hyun, dan Lee Myung Bak dan ada pula reaksi

Walaupun demikian, kebijakan yang dilakukan Korea Selatan. Pada bab ini juga

berisi mengenai kendala yang dihadapi Korea Selatan dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Bab III. Strategi kebijakan luar negeri terhadap Korea Utara di masa pemerintahan Park Geun Hye

Bab ini berisi mengenai strategi kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara di masa pemerintahan Park Geun Hye. Pada bab ini menjelaskan bagaimana diplomasi serta strategi aliansi dari Korea Selatan terhadap Korea Utara untuk mencapai kepentingan nasional dan untuk mengatasi konflik yang terjadi di Semenanjung Korea. Dan beberapa hasil yang didapat dari diplomasi yang telah dibuat di masa pemerintahan Park Geun Hye.

Bab IV

Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari skripsi ini